

## **KEBIJAKAN PENDIDIKAN MENTERI SYARIF THAYEB TAHUN 1974-1978**

Oleh  
Mela Mita Septiana  
Pembimbing: Dr. Dyah Kumalasari, M.Pd.

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan latar belakang kehidupan Syarif Thayeb; (2) menganalisis kondisi pendidikan di Indonesia tahun 1974-1978; (3) menganalisis Kebijakan Pendidikan yang diterapkan oleh Syarif Thayeb tahun 1974-1978.

Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian sejarah kritis menurut Kuntowijoyo. Sumber data yang digunakan terdiri dari, arsip dan dokumen. Tahap penelitian yang pertama adalah pemilihan topik, tahap kedua heruristik atau pengumpulan sumber, tahap ketiga verifikasi atau kritik sumber, tahap keempat interpretasi dan tahap kelima historiografi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Syarif Thayeb lahir pada 7 Agustus 1920, merupakan seorang berdarah Aceh. Keturunan seorang *Uleebalang* yang masih merupakan golongan bangsawan. Riwayat pendidikan beliau bukan diawali pada bidang pendidikan melainkan bidang kedokteran. Berkat kemampuannya pada bidang pendidikan Syarif Thayeb terpilih menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1974-1978; (2) Kondisi pendidikan di Indonesia tahun 1970-an masih cukup memprihatinkan. Permasalahan ledakan penduduk memberikan dampak bagi pendidikan. Kesadaran akan pentingnya pendidikan terus meningkat namun keterbatasan sarana dan prasarana tidak dapat menampung besarnya keinginan untuk memperoleh pendidikan. Permasalahan daya tampung bagi anak usia sekolah 7-12 tahun menjadi permasalahan yang harus diselesaikan. Memasuki tahun 1974-an permasalahan yang ditangani masih sama, yaitu seputar perluasan dan pemerataan kesempatan belajar bagi kelompok usia 7-12 tahun. Serangkaian permasalahan pendidikan seperti sistem pendidikan, mutu pendidikan, relevansi pendidikan juga menjadi permasalahan pendidikan pada tahun 1974-1978; (3) Kebijakan Menteri Syarif Thayeb yang diterapkan pada tahun 1974-1978 adalah: Kebijakan Pembangunan SD Inpres, Kebijakan Keringanan dan Pembebasan SPP, Kebijakan Pemberian Beasiswa, Kebijakan Pendidikan Guru, Kebijakan Pendidikan Luar Sekolah. Serta peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan dengan pembaharuan pada: Kurikulum, Relevansi Pendidikan.

Kata kunci: Kebijakan Pendidikan, Syarif Thayeb, Tahun 1974-1978

# MINISTER SYARIF THAYEB'S EDUCATIONAL POLICIES IN 1974-1978

**Mela Mita Septiana**  
**NIM 10406244033**

## ABSTRACT

This study aims to: (1) describe Syarif Thayeb's life background, (2) analyze the conditions of education in Indonesia in 1974-1978, and (3) analyze educational policies that Syarif Thayeb implemented in 1974-1978.

This thesis writing employed the historical critical method by Kuntowijoyo. The data sources consisted of archives and documents. The first research stage was topic selection, the second was heuristics or source collection, the third was verification or source criticism, the fourth was interpretation, and the fifth was historiography.

The findings of the study were as follows. (1) Syarif Thayeb was born on 7 Agustus 1920 and an Acehnese descendant. He was an *Uleebalang* descendant belonging to an aristocratic class. Because of his capabilities in the educational field, he was appointed as the Minister of Education and Culture in 1974-1978. (2) The conditions of education in Indonesia in the 1970s caused a lot of concern. Problems in the population boom affected education. The awareness of the importance of education increased but the limited infrastructure facilities could not support the growing demands for educational participation. The capacity to cater for school age children of 7-12 years became the problem that had to be solved. Approaching the 1974s, the problem that had to be dealt with remained the same, namely about the learning opportunity extension and equity for the age group of 7-12 years. A chain of educational problems such as the educational system, educational quality, and educational relevance also became educational problems in 1974-1978. (3) Minister Syarif Thayeb's policies applied in 1974-1978 included: the policy on the Elementary School Establishment based on the President's Instruction, the policy on the Relief and Exemption in School Fees, the policy on the Scholarship Award, the policy on Teacher Education, the policy on Off-school Education, and the improvement of the educational quality made through innovations on the Curriculum and the Educational Relevance.

**Keywords:** *Educational Policies, Syarif Thayeb, 1974-1978*

## PENDAHULUAN

Kebijakan adalah konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi, dan sebagainya). Mustopodidjaja menjelaskan bahwa, istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitanya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya. Dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan.<sup>1</sup> Berdasarkan ketetapan-ketetapan MPR tahun 1973, 1978, 1983 banyak sekali kebijakan-kebijakan pendidikan yang telah dikeluarkan yang berwujud sebagai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan-Keputusan, Surat Edaran, Proyek Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan dalam Sarana/Prasarana, Kurikulum, Metode, dan sebagainya demi mencapai tujuan pendidikan yang telah digariskan dalam TAP-TAP tersebut.<sup>2</sup>

Pada Hakekatnya Tujuan Pendidikan menurut Ketetapan No.VI/MPR/1973 yang dikenal dengan nama Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang merumuskan Tujuan Pendidikan Nasional. Bahwa pendidikan hakekatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Oleh karenanya agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, maka pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.<sup>3</sup>

Sebelum memasuki periode tahun 1974-1978 tepatnya sebelum REPELITA I dan II dirasakan bahwa output pendidikan di Indonesia tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat, baik dalam kualitas maupun kuantitas. Usaha-usaha yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga pendidikan tidak dapat menempatkan diri dan mengikuti perkembangan yang sedang dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat.<sup>4</sup> Pada masa Pemerintahan Orde Lama banyak tenaga-tenaga ahli asing yang pulang ke negara asalnya karena situasi politik dan ekonomi pada saat itu. Sehingga selama kepergian mereka pada awal dimulainya PELITA kebutuhan akan tenaga ahli untuk pembangunan sangat meningkat, sedangkan produksi perguruan tinggi sebagai sumber tenaga ahli dan harus sesuai dengan tuntutan pembangunan tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Kondisi Pendidikan di Indonesia sebelum tahun 70-an masih dikatakan sebagai pendidikan yang sangat memprihatinkan. Serangkaian permasalahan

---

<sup>1</sup> Hanif Nurcholis. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*: Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 263.

<sup>2</sup> Ary H. Gunawan. *Kebijakan Kebijakan Pendidikan di Indonesi*. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 59.

<sup>3</sup> Hanif Nurcholis, *op.cit.*, hlm. 52.

<sup>4</sup> Depdikbud RI. *Pendidikan dan Kebudayaan dalam Pembangunan*. Jakarta: Depdikbud RI, 1977, hlm. 44.

Pendidikan yang terjadi pada waktu itu berusaha diatasi melalui program-program oleh Pemerintah, namun tidak semua permasalahan dapat diatasi. Memasuki tahun 1974 pada saat Menteri P dan K Syarif Thayeb berbagai permasalahan di bidang pendidikan yang terjadi pada tahun 70-an masih terlihat. Permasalahan tersebut memberi dampak bagi pemerintah dalam mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan pendidikan tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang kebijakan pendidikan pada tahun 1974-1978.

#### METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo. Metode Penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian sejarah ini memiliki lima tahap utama yang mana telah dikemukakan oleh Kuntowijoyo, yakni pemilihan topik, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.<sup>5</sup>

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, pendekatan politik dan pendekatan ekonomi. Dalam deskripsi ini pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami bagaimana kondisi pendidikan masyarakat terhadap Kebijakan Pendidikan yang diterapkan oleh Syarif Thayeb. Pendekatan Politik pada penulisan ini digunakan untuk mengetahui hubungan politik dengan kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh Syarif Thayeb selama menjabat sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan. Pendekatan ekonomi pada penulisan ini digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. Kondisi ekonomi tersebut mempengaruhi pelaksanaan pendidikan di Indonesia, begitu pula kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah.

#### PEMBAHASAN

Syarif Thayeb<sup>6</sup> merupakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menjabat pada tahun 1974-1978 pada era Orde Baru Kabinet Pembangunan II. Namanya jarang terdengar oleh masyarakat awam, sehingga terdengar asing di telinga mereka. Syarif Thayeb memiliki kegemaran bermusik, terutama alat musik biola dan olahraga golf, dan merupakan ketua salah satu klub olahraga golf di Jakarta. Akrab di panggil Syarif Thayeb, nama lengkapnya adalah Teuku Muhammad Syarif Thayeb lahir pada 7 Agustus 1920 di kota Peureula, Aceh.<sup>7</sup>

Kepedulian terhadap pendidikan memang sangat terasa dalam keluarganya yang merupakan golongan bangsawan. Sehingga beliau menempuh pendidikan tinggi yang akan menghantarkannya menuju pada kegemilangan

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 89.

<sup>6</sup> Sumardi dkk. *Menteri-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sejak Tahun 1966*. Jakarta: Depdikbud, 1984, hlm. 55.

<sup>7</sup> *Ibid*.

karirnya, hingga menjabat sebagai Menteri P dan K tahun 1974-1978. Syarif Thayeb melanjutkan sekolah pada *Geneeskundige Hogeschool*<sup>8</sup> pada tahun 1933 sampai tahun 1938 di Aceh.

Selang 7 tahun setelah menyelesaikan sekolahnya pada *Geneeskundige Hogeschool* pada tahun 1945 beliau meneruskan pendidikannya di Perguruan Tinggi Kedokteran di Jakarta yang bernama *Ikkadai Gakko Call College*.<sup>9</sup> Kemudian melanjutkan belajar ke Amerika Serikat pada Sekolah Kesehatan, Harvard University di Boston, Massachusetts pada tahun 1955 sampai 1957. Pada tahun 1958 melanjutkan sekolah pada *Pediatrics School of Medicine Temple University*, Philadelphia.

Selang kurang lebih satu tahun beliau menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Umum (RSUP) yang sekarang bernama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta. Keahliannya pada bidang medis membuat beliau diberi kepercayaan menjadi dosen senior pada Fakultas Kedokteran Bagian Anak Universitas Indonesia Jakarta. Pada tahun 1962 hingga tahun 1964 Syarif Thayeb diangkat menjadi Rektor di Universitas Indonesia di Jakarta. Selain itu, beliau juga menjadi Ketua Badan Pelindung Universitas Trisakti Jakarta, dan merupakan salah seorang yang berpartisipasi secara aktif dalam lahirnya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI).

Syarif Thayeb diangkat sebagai Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP). Pada era Orde Lama dari tahun 1964 sampai tahun 1966 pada Kabinet Dwikora. Pengalamannya memang sangat banyak di bidang yang beliau kuasai, pada tahun 1966 setelah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Menteri PTIP beliau bergabung menjadi anggota DPR Gotong Royong dan menjabat sebagai wakil ketua sampai tahun 1971. Syarif Thayeb pernah ditunjuk sebagai Duta Besar RI untuk Amerika Serikat dan Brazil, yang berkedudukan di Washington pada tahun 1971 sampai tahun 1974. Menjelang akhir masa jabatannya menjadi Duta Besar RI untuk AS beliau mendapat mandat dari Presiden Soeharto untuk memegang jabatan sebagai Menteri P dan K, yang dilantik pada tanggal 22 Januari 1974 di Istana Negara.

Kondisi Pendidikan di Indonesia sejak dimulainya Pelita<sup>10</sup> I Departemen Pendidikan dan Kebudayaan<sup>11</sup> telah melakukan penilaian secara sistematis dan mendalam tentang keadaan pendidikan di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa keadaan pendidikan di Indonesia benar-benar sangat menyedihkan. Para peneliti pendidikan telah melakukan penelitian dimana mereka menemukan berbagai

---

<sup>8</sup> BP3P. *Pendidikan di Indonesia 1900-1974*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976, hlm. 40.

<sup>9</sup> Sekolah Kedokteran zaman penjajahan Jepang.

<sup>10</sup> PELITA: Pembangunan Lima Tahun, lihat buku Sutisna Soemantri. *Repelita: Rencana Pembangunan Lima Tahun 1969/ 1970- 1973/ 1974 Republik Indonesia*. Bandung, 1969.

<sup>11</sup> Pada penulisan selanjutnya akan ditulis Departemen P dan K.

permasalahan pendidikan yang terjadi pada pendidikan di Indonesia pada masa jabatan Menteri P dan K Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro. Pada tahun 1973 11,8 juta penduduk yang berusia 7-12 tahun duduk di sekolah dasar, masih tersisa 8,9 juta dalam kelompok yang tidak berpendidikan. Berarti sekitar 2,9 juta saja yang dapat memperoleh pendidikan sekolah dasar. Tingkat kesadaran akan pendidikan pada perguruan tinggi hanya dapat mencapai 1% penduduk atau sekitar 329.000 mahasiswa yang terdaftar di lembaga perguruan tinggi negeri dan swasta.

Situasi pendidikan yang sedemikian pelik, membuat bangsa Indonesia dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pendidikan nasional dihadapkan pada masalah-masalah pokok. Masalah tekanan eksplosif penduduk, Masalah kurangnya supply tenaga, uang dan fasilitas, Masalah warisan multi-sistem administrasi negara untuk pendidikan, dan Masalah pendidikan yang usang.<sup>12</sup> Serangkaian permasalahan-permasalahan yang tercantum di atas, merupakan beberapa contoh permasalahan pendidikan yang dialami oleh bangsa Indonesia menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan<sup>13</sup> tahun 1969-1972 Mashuri. Masalah ledakan penduduk menurut Mashuri mencapai 2,5% dan 3,0% per tahun.

Ledakan penduduk yang tidak dapat diimbangi oleh penyediaan sarana pendidikan yang seimbang menimbulkan ketidak stabilan. Kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pendidikan semakin tinggi. Akan tetapi fasilitas yang disediakan bagi mereka jauh dari cukup. Ratio penduduk usia sekolah dengan daya tampung tidak seimbang. Dampak ketidak seimbangan tersebut terjadi pada beberapa wilayah di Indonesia, seperti yang terjadi di Jawa Timur. Penurunan angka partisipasi penduduk usia sekolah yang terjadi di Jawa Timur memberikan gambaran bahwa jumlah sekolah tidak sebanding dengan banyaknya anak yang ingin masuk sekolah. Faktor-faktor lain yang menyebabkan penurunan partisipasi anak usia sekolah antara lain; kurangnya daya tampung bagi mereka yang ingin masuk sekolah. Tingginya jumlah anak putus sekolah, rendahnya aspirasi masyarakat terhadap pendidikan dan keadaan ekonomi orang tua.

1). Kurangnya daya tampung

Kurangnya daya tampung mengakibatkan masih banyak anak-anak yang tidak memiliki kesempatan belajar. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah mengusahakan terciptanya kesempatan belajar yang lebih luas dan merata terutama pada sekolah dasar, yaitu dengan Pembangunan SD Inpres.

2). Tingginya jumlah anak putus sekolah

Jumlah angka anak yang putus sekolah menjadi faktor penurunan partisipasi anak usia sekolah. Jumlah anak yang putus sekolah terbanyak berada di daerah pedesaan. Daerah pedesaan anak putus sekolah sampai 20% setiap tahunnya. Berarti bahwa dari 40 murid baru dikelas I pada awal tahun ajaran hanya tinggal sebanyak 32 orang pada akhir tahun ajaran.

---

<sup>12</sup> Mashuri. "Menuju Sistem Pendidikan Pembangunan. Gambaran Umum Masalah<sup>2</sup> Pendidikan Indonesia". *Prisma*. Edisi: 1 Maret 1972, hlm. 7.

<sup>13</sup> Pada penulisan selanjutnya akan ditulis Menteri P dan K.

Sampai jenjang kelas VI hanya kurang lebih 13 orang saja. Jumlah anak yang tinggal kelas juga mempengaruhi jumlah anak yang putus sekolah dan mengurangi daya tampung bagi anak-anak yang akan masuk, sedangkan anak yang tinggal kelas rata-rata 20% setiap tahun. Sebagian dari mereka mengulang dan selebihnya keluar atau putus sekolah.

3). Rendahnya aspirasi masyarakat terhadap pendidikan dan keadaan ekonomi orang tua

Masih banyak anak yang tidak pernah bersekolah sama sekali walaupun sekolah tersedia, karena orang tua tidak mampu dalam perekonomiannya atau memang tidak ingin menyekolahkan anak mereka. Tidaklah mengherankan jika di pedesaan ditemukan sekolah-sekolah yang sangat sedikit muridnya dan berarti akan mengurangi angka aspirasi. Banyaknya anak yang masih belum berpartisipasi atau tidak berpartisipasi lagi di SD dipengaruhi oleh masalah-masalah yang sudah dijelaskan diatas, yaitu daya tampung, putus sekolah, tinggal kelas dan tingkat aspirasi serta ekonomi masyarakat.

Sistem pendidikan yang dimiliki merupakan suatu sistem pendidikan yang tidak relevan, baik bagi seseorang maupun bagi masyarakat yang sedang membangun.<sup>14</sup> Sistem pendidikan yang dimiliki merupakan warisan dari sistem pendidikan kolonial yang dimaksudkan untuk mencetak manusia-manusia yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sistem kolonial. Sistem pendidikan yang dimiliki merupakan suatu sistem pendidikan yang tidak relevan, baik bagi seseorang maupun bagi masyarakat yang sedang membangun.<sup>15</sup> Sistem pendidikan yang dimiliki merupakan warisan dari sistem pendidikan kolonial yang dimaksudkan untuk mencetak manusia-manusia yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sistem kolonial.

Mengenai kualitas dari pendidikan waktu itu, dari semua guru yang mengajar hanya kira-kira terdapat 25% yang qualified, dan kira-kira 60% semiqualified. Fasilitas pendidikan yang serba minimal, ketersediaan buku-buku pembelajaran yang terbatas, rata-rata kurang dari 1 untuk setiap murid. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa keadaan kualitas pendidikan pada tahun 70-an awal Pelita I masih dalam kondisi yang memprihatinkan. Kurikulum pendidikan yang merupakan pencerminan falsafah sistem pendidikan tidak relevan dengan kebutuhan pendidikan yang ada waktu itu.

Pesatnya laju pembangunan pendidikan di sektor pendidikan khususnya mulai periode Pelita II, merupakan dampak dari perluasan kesempatan belajar di Sekolah Dasar yang dilakukan pada awal tahun 1970-an.<sup>16</sup> Memasuki tahun 1974-1978 pada saat Syarif Thayeb menjabat sebagai Menteri P dan K, masih terdapat sejumlah permasalahan pendidikan yang perlu diatasi dan memerlukan

---

<sup>14</sup> Tb. Bachtiar Rifai dan S. Sudarmadi. "Sekolah Pembangunan sebagai pelaksana pembaharuan Pendidikan". *Prisma*. Edisi 27 Maret 1972, hlm. 42.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Wardiman Djoyodiningrat. *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Depdikbud RI, 1995, hlm. 148.

perhatian. Permasalahan pendidikan yang masih memerlukan perhatian khusus yaitu tentang pemerataan dan perluasan kesempatan belajar, dimana permasalahan tersebut pada tahun 70-an juga merupakan masalah yang memerlukan perhatian.

Situasi pendidikan di Indonesia tahun 1974-1978 tak jauh beda dengan situasi pendidikan pada tahun awal 70-an. Pemerintah masih mengusahakan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali daerah pelosok di pedesaan agar seluruh rakyat dapat mengenyam pendidikan. Masalah mutu pendidikan, biaya pendidikan, relevansi pendidikan, juga masih menjadi permasalahan di tahun 1974.

#### 1). Perluasan dan Pemerataan Kesempatan Belajar

Perluasan dan pemerataan kesempatan belajar masih menjadi agenda program kerja Pemerintah dan Depertemen P dan K. Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri lagi, betapa masih banyaknya anak-anak usia sekolah usia 7-12 tahun yang tidak sempat menikmati pendidikan, masih banyaknya anak yang meninggalkan sekolah sebelum waktunya/*drop out* karena berbagai alasan dan faktor-faktor tertentu. Masih banyaknya orang dewasa yang belum pernah turut menikmati pendidikan. Kondisi tersebut tidak dapat disangkal, karena memang telah menjadi masalah Pendidikan di Indonesia pada saat itu.

Permasalahan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar menjadi sebab rendahnya pendidikan di Indonesia. Sehingga mengakibatkan anak usia 7-12 tahun belum semuanya dapat ditampung di sekolah-sekolah. Angka anak putus sekolah juga menjadi sebab rendahnya pendidikan, dari 100 anak yang masuk di kelas 1 hanya sekitar kurang lebih seper empatnya yang mampu bertahan hingga lulus sekolah dasar. Usaha-usaha Pemerintah untuk menekan angka rendahnya partisipasi anak sekolah jalan yang tepat yaitu dengan membangun gedung-gedung SD Inpres.

#### 2). Biaya Pendidikan/ Pembebasan SPP

Persoalan yang harus dimulai dengan memecahkan dilema yang tak kunjung berakhir yaitu antara apa yang semestinya dan apa yang seadanya, tak terkecuali Pendidikan.<sup>17</sup> Semua warga negara Indonesia menginginkan sekolah, namun banyak faktor yang membatasinya. Berbagai faktor pembatas yang terlihat seperti faktor biaya, sarana yang ada, jenis orientasi dan visi. Suatu pilihan memang harus dijalankan untuk menentukan dan menjalankan suatu kebijaksanaan tertentu. Meskipun kebijakan bukanlah merupakan suatu penentu. Tetapi kebijakan tersebut menentukan untuk siapakah seluruh sistem pendidikan yang dijalankan.

Biaya pendidikan di Indonesia masih menjadi permasalahan yang harus segera mendapatkan perhatian kala itu. Masih banyak anak-anak yang tidak dapat sekolah dikarenakan biaya pendidikan yang melambung tinggi. Terlebih lagi biaya sekolah yang semestinya dibayar ditangguhkan lagi biaya tambahan seperti biaya bahan pelajaran, ekstrakurikuler dan lain-lain. Kondisi seperti itu terjadi pada sebagian daerah di Indonesia.

---

<sup>17</sup> Pengantar Majalah *Prisma* berjudul Serba Pandang Tentang Pendidikan.



### 3). Mutu Pendidikan

Persoalan mutu pendidikan yang tengah dihadapi Indonesia tahun 1974-1978 belum seutuhnya di selesaikan pada Pelita I dan masih menjadi PR pemerintah khususnya Departemen P dan K. Pemerintah berupaya meningkatkan mutu pendidikan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia baik pada lembaga-lembaga pendidikan di kota-kota maupun di desa-desa.

Peningkatan mutu tersebut didasarkan pada kurikulum pendidikan, pendidik/guru, dan lembaga-lembaga pendidikan yang berkompeten dalam mendukung perbaikan mutu pendidikan. Menurut pendapat dari peneliti pendidikan menyatakan bahwa tugas membuat kesempatan mendapatkan pendidikan menjadi lebih merata dan menjangkau lapisan-lapisan bawah dari masyarakat ternyata relatif lebih mudah daripada tugas meningkatkan mutu pendidikan.<sup>18</sup> Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam melakukan peningkatan mutu pendidikan adalah faktor penerapan kurikulum yang tidak relevan, pihak-pihak yang menentukan mutu pendidikan tersebut tidak kompeten yaitu para guru yang belum memenuhi standar sebagai guru yang profesional. Dan faktor terakhir yaitu lembaga pendidikan yang hanya menghitung jumlah lulusan yang banyak tanpa memperhatikan kualitas para lulusan, dan tanpa memikirkan apakah lulusan dapat diterima pada kebutuhan tenaga kerja yang ada di masyarakat.

Kebijakan-kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Syarif Thayeb merupakan kebijakan untuk mengatasi permasalahan pendidikan pada tahun 1974-1978. Kebijakan Pembangunan gedung SD Inpres, dalam rangka mempercepat peningkatan kesempatan belajar pada sekolah dasar khususnya kelompok usia 7-12 tahun, sejak Pelita I diadakan perluasan daya tampung dengan Program Bantuan Pembangunan sekolah dasar atau yang dikenal dengan Program Instruksi Presiden atau sering disebut SD Inpres. Program bantuan pembangunan gedung sekolah dasar ini dilengkapi dengan penyediaan guru, perabot sekolah, buku-buku pelajaran pokok dan buku bacaan anak-anak untuk perpustakaan.<sup>19</sup>

Kebijakan Keringanan dan Pembebasan SPP, usaha Pemerintah dalam rangka memberikan kesempatan belajar yang seluas-luasnya bagi anak usia sekolah terutama bagi anak-anak yang orang tuanya kurang mampu. Pada tahun 1968 pemerintah telah memperkenalkan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), yakni masyarakat dibebani biaya pendidikan sejak sekolah dasar.<sup>20</sup> Menteri P dan K telah mengeluarkan keputusan tentang Sumbangan Pembinaan

---

<sup>18</sup> Mochtar Buchori. *Evolusi Pendidikan di Indonesia dari Kweekschool sampai ke IKIP 1852-1998*. Yogyakarta: Insist Press, 2007, hlm. 130.

<sup>19</sup> Edward H. Heneveld dkk., "Perataan Kesempatan Belajar: Model Pengalokasian dan Studi Penilaian SD Inpres". *Prisma*. Edisi 2 Maret 1976, hlm. 76.

<sup>20</sup> Mohammad Ali. *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional*. Jakarta: Grasindo, 2009, hlm. 16.

Pendidikan. Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan RI No.0257/K/1974, No.221 tahun 1974 dan Keputusan No.1606/MK/1/1974 tentang Peraturan Sumbangan Pendidikan (SPP), dengan menimbang keputusan No.0192/1971.

Kebijakan Pemberian Beasiswa, kesempatan belajar yang sama kepada setiap siswa/ mahasiswa supaya mereka menikmati pendidikan. Pada lembaga-lembaga pendidikan negeri termasuk lembaga-lembaga pendidikan kedinasan dan lembaga pendidikan swasta bersubsidi untuk memberikan kesempatan kepada siswa/mahasiswa yang menonjol dalam segi akademisnya tetapi tidak mampu untuk membiayai studinya. Pemerintah memberikan beasiswa kepada mereka dengan persyaratan tertentu.

Pemberian beasiswa itu dilakukan untuk mencari bakat yang luar biasa terutama bagi kebutuhan pembangunan, sehingga dengan bantuan beasiswa tersebut dapat meringankan orang tua atas biaya pendidikan anaknya. Sesuai dengan asas demokrasi maka beasiswa tersebut merupakan realisasi dari demokrasi pada pendidikan yang terbuka bagi semua warga negara. Keputusan Pemerintah tentang Pemberian Beasiswa dalam rangka Program Pembinaan Bakat dan Prestasi No.0267/ 1974. Selama tahun 1975 pemerintah telah melakukan bantuan beasiswa dalam rangka program pembinaan bakat dan prestasi pada SD, SLP, SLA, dan Perguruan Tinggi.

Kebijakan Pendidikan Guru, dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas guru, dimana masih menjadi masalah pendidikan di Indonesia, penataran yang dilaksanakan untuk menjadikan guru yang berkualitas. Selain itu jumlah guru yang tidak sebanding dengan jumlah pertambahan SD Inpres mengakibatkan kekurangan guru. Guru SD pada awal Pelita II tercatat sebanyak 425.000 sedangkan yang diperlukan pada akhir Pelita II sebanyak 525.000, sehingga terdapat kekurangan 100.000 guru SD.<sup>21</sup> Kekurangan tersebut ditambah dengan kebutuhan untuk mengganti guru yang pensiun atau meninggal. Sekolah Pendidikan Guru/ SPG menjadi alternatif dalam menambah ketersediaan guru. Selama Pelita II telah direncanakan pengembangan 66 SPG dan 1 SGPLB. Proyek Pendidikan Guru yang merupakan bagian dari suatu kerangka menyeluruh dari profesi guru, tidak hanya meliputi pendidikannya saja tetapi juga pengabdian terhadap masyarakat. Proyek tersebut direncanakan akan mampu mendorong perkembangan pendidikan guru baik secara kualitatif maupun kuantitatif terutama kurikulumnya.

Kebijakan Pendidikan Luar Sekolah, dikeluarkan pemerintah untuk menekan angka putus sekolah. Kondisi pendidikan di Indonesia mengenai permasalahan anak putus sekolah dan anak tinggal kelas cukup tinggi yaitu 474 untuk tiap 1000 pelajar selama periode 6 tahun (1972-1978) jadi hampir setengahnya anak putus sekolah. Pendidikan Luar Sekolah berperan dalam mengatasi permasalahan yang tengah dialami, salah satunya dengan mempersingkat waktu belajar. Pendidikan bukan hanya menyalurkan pengetahuan dan ketrampilan, tetapi juga dapat meramalkan berbagai jenis ketrampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kegiatan yang berbentuk kursus kilat, kursus dan

---

<sup>21</sup> Depdikbud, *op.cit.*, hlm. 19.

latihan yang disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan diberikan kepada masyarakat melalui suatu lembaga yaitu PLPM (Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat). Kursus tersebut dibuka bagi setiap masyarakat yang ingin menambah ketrampilan maupun bagi mereka yang belum mendapatkan kesempatan untuk sekolah di sekolah formal.

Peningkatan mutu pendidikan diupayakan pemerintah yaitu dengan melakukan pembaharuan kurikulum dan relevansi pendidikan. Pembaharuan pada mutu pendidikan mencakup seluruh sistem pendidikan yang mana kurikulum pendidikan merupakan salah satu komponen dasar yang memerlukan pembenahan. Kurikulum 1975 dan Kurikulum 1976 yang ditetapkan oleh pemerintah telah menerapkan prinsip-prinsip pembaharuan, dan berorientasi pada tujuan pendidikan. Segala bahan pelajaran, kegiatan belajar, dan pengajar dipilih dan direncanakan serta diorganisasikan sesuai dengan tujuan pendidikan yang hendak dicapai.

Masalah output/lulusan pendidikan Indonesia yang tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas. Banyak dari para lulusan lembaga-lembaga pendidikan tidak dapat menempatkan diri mengikuti pembangunan yang sedang dilaksanakan ditengah masyarakat. Untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern dan sesuai dengan GBHN, dimana sistem pendidikan harus disesuaikan dengan keperluan pembangunan. Relevansi pendidikan merupakan usaha untuk melakukan perbaikan dan pembaharuan pada sistem pendidikan yang sudah tidak relevan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan , maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Syarif Thayeb lahir pada 7 Agustus 1920 di Peurlah, Aceh, nama panjang Teuku Muhammad Syarif Thayeb. Merupakan seorang keturunan uleebalang bernama Teuku Cik Mohammad Thayeb. Syarif Thayeb mengawali pendidikannya pada Genesskundige Hogeshool pada tahun 1927, kemudian meneruskan pada perguruan tinggi Ikkadai Gakko Collage. Syarif Thayeb menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 22 Januari 1974.
2. Masalah ledakan penduduk yang tidak dapat diimbangi oleh ketersediaan sarana pendidikan menimbulkan ketidak stabilan. Sehingga mengakibatkan penurunan angka partisipasi penduduk usia sekolah, penurunan angka partisipasi disebabkan oleh faktor kurangnya daya tampung, tingginya jumlah anak putus sekolah, rendahnya aspirasi masyarakat terhadap pendidikan dan keadaan ekonomi orang tua. Permasalahan pendidikan di tahun 1970-an yang masih terjadi pada awal tahun 1974 yaitu, masalah minimnya perluasan dan pemerataan kesempatan belajar, masalah pembiayaan pendidikan. Persoalan mutu pendidikan yang tengah dihadapi Indonesia tahun 1974-1978, serta masalah relevansi dan efisiensi pendidikan.
3. Kebijakan Pendidikan yang dikeluarkan oleh Syarif Thayeb untuk mengatasi permasalahan pendidikan pada tahun 1974-1978 adalah: Kebijakan

Pembangunan SD Inpres, Kebijakan Keringanan dan Pembebasan SPP, Kebijakan Pemberian Beasiswa, Kebijakan Pendidikan Guru, Kebijakan Pendidikan Luar Sekolah. Serta peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan dengan pembaharuan pada: Kurikulum, Relevansi Pendidikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ary H Gunawan. (1986). *Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- BP3K. (1976). *Pendidikan di Indonesia 1900-1974*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Depdikbud RI. (1977). *Pendidikan dan Kebudayaan dalam Pembangunan*. Jakarta: Depdikbud RI.
- Hanif Nurcholih. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. : Grasindo.
- Mochtar Buchori. (2007). *Evolusi Pendidikan di Indonesia dari Kweekschool sampai ke IKIP 1852-1998*. Yogyakarta: Insist Press.
- Mohammad Ali. (2009). *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional*. Jakarta: Grasindo.
- Sumardi dkk. (1984). *Menteri-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sejak Tahun 1966*. Jakarta: Depdikbud.
- Sutisna Soemantri. (1969). *Repelita: Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1969/1970-1973/1974 Republik Indonesia*. Bandung.
- Wardiman Djoyodiningrat. (1995). *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Depdikbud RI.
- Edward H. Heneveld, dkk. 1976. "Perataan Kesempatan Belajar: Model Pengalokasian dan Studi Penilaian SD Inpres", *Prisma*. Edisi No.2 Tahun V.
- Mashuri. 1972. "Menuju Sistem Pendidikan Pembangunan Gambaran Umum Masalah<sup>2</sup> Pendidikan Indonesia", *Prisma*, Edisi No.3.
- Tb. Bachtiar Rifai dan S. Sudarmadi. 1972. "Sekolah Pembangunan sebagai pelaksana pembaharuan Pendidikan", *Prisma*. Edisi No.3.

Reviewer  
Yogyakarta, 2014  
Pembimbing

Zulkarnain, M.Pd.  
NIP. 19740809 200812 1 001

Dr. Dyah Kumalasari, M.Pd.  
NIP. 19770618 200312 2 001